

SATJIPTO RAHARJO DAN KRITIKNYA TERHADAP EKONOMI KOLONIALISME

Andi Tri Haryono

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract

Colonialism under Dutch rule constitutes one of the darkest periods in Indonesian history, marked by widespread suffering resulting from exploitative economic policies, particularly the cultuurstelsel (Cultivation System). This article examines economic colonialism from two main perspectives. First, it analyzes the discourse of classical liberal economic thinkers, including Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, and John Stuart Mill, whose ideas on free trade and economic prosperity were frequently used to justify colonial expansion and the exploitation of overseas territories. Such ideological foundations legitimized commercial and territorial expansion by Western powers, resulting in profound social and economic consequences for colonized regions in Asia, Africa, and South America. Second, the article argues that contemporary economic colonialism has re-emerged in a different form through the growing influence of multinational corporations (MNCs). Their dominance in market mechanisms, organizational structures, human resource management, operations, and marketing has significantly shaped national economies. In Indonesia, the expansion of MNCs has intensified market concentration and posed substantial challenges to domestic enterprises and indigenous entrepreneurs. The article concludes that although the forms of colonialism have changed, economic domination remains a persistent feature of global capitalism.

Keywords: *Economic Colonialism; Cultivation System (Cultuurstelsel); Classical Liberalism; Multinational Corporations (MNCs); Global Capitalism.*

Abstrak

Kolonialisme Belanda merupakan salah satu periode paling kelam dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh penderitaan masyarakat akibat kebijakan ekonomi yang bersifat eksploitatif, terutama melalui penerapan *cultuurstelsel* (tanam paksa). Artikel ini mengkaji kolonialisme ekonomi dari dua perspektif utama. Pertama, artikel menganalisis diskursus para pemikir ekonomi liberal klasik, seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, dan John Stuart Mill, yang gagasannya mengenai perdagangan bebas dan kemakmuran ekonomi kerap dijadikan landasan ideologis bagi ekspansi perdagangan dan kolonialisme oleh negara-negara Barat. Legitimasi tersebut mendorong perluasan kekuasaan ekonomi dan teritorial yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kedua, artikel ini berpendapat bahwa kolonialisme ekonomi pada era kontemporer hadir kembali dalam bentuk dominasi korporasi multinasional (*Multinational Corporations* atau MNC). Dominasi MNC melalui mekanisme pasar, struktur organisasi, kebijakan sumber daya manusia, manajemen operasi, dan strategi pemasaran telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Di Indonesia, ekspansi MNC berkontribusi pada meningkatnya konsentrasi pasar serta menghadirkan tantangan bagi keberlangsungan perusahaan nasional dan pengusaha pribumi. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun bentuk kolonialisme telah berubah, praktik dominasi ekonomi tetap menjadi karakter utama kapitalisme global.

Kata kunci: Kolonialisme Ekonomi; *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa); Liberalisme Klasik; Korporasi Multinasional (MNC); Kapitalisme Global.

Pada tanggal 8 Januari 2010, langit gelap menyelimuti seluruh civitas akademik Universitas Diponegoro, hari tersebut seorang guru besar telah mangkat beristirahat di samping sang khalik. Beliau adalah Prof Satjipto Raharjo, kalau kita mendengar nama beliau pasti dalam benak kita akan teringat tentang Hukum Progresif. Sang Begawan Hukum Progresif tersebut tak-ubahnya seperti sebuah mutiara yang berkilau. Almarhum memang sangat pantas berada di tempat tersendiri dalam jajaran pemikir di Indonesia.

Dari beberapa manuskripnya, baik itu dalam bentuk buku maupun artikel yang terbit di berbagai media, anasir-anasir pemikiran Prof Tjip banyak menyuarakan berbagai macam kritik terkait problem-problem sosio-kultural bangsa, tidak hanya dari perspektif hukum semata, akan tetapi berbagai macam perspektif beliau coba lontarkan. Kritik sang Begawan Hukum Progresif di luar domain hukum dibuktikan manakala beliau menulis sebuah artikel harian Kompas yang berjudul *Masa Lalu Indonesia-Belanda*¹, meskipun masih banyak lagi artikel lainnya. Akan tetapi saya mencoba memulai menyatroni alam fikir beliau dari tulisan tersebut. Artikel tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah catatan yang memberi gambaran bahwa, Negara Belanda yang tergolong besar dan kaya, dan kini menjadi Negara anggota G8 ternyata banyak berhutang budi kepada Indonesia. Sejarah telah menorehkan saksi bahwa, hutang budi Belanda terhadap pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia) dapat kita lihat dari proses panjang pemerintahan kolonialisme di Indonesia (masih Hindia Belanda kala itu).

Prof Tjip dalam artikelnya mengungkapkan:

*Jika gambar tersebut ditarik mundur hingga abad ke-19, secara ekstrim dapat dikatakan, andai kata tidak ada Indonesia (Hindia-Belanda), Belanda tidak akan menjadi seperti sekarang, bahkan sudah lama bangkrut dan terhapus dari peta bangsa-bangsa di dunia. Saat itu Indonesia adalah malaikat penolong bagi Belanda yang berada di ambang kebangkrutan*².

Sepenggal kalimat yang diungkapkan oleh Prof Tjip diatas, seolah-olah meyakinkan kita bahwa, perhatian beliau tidak hanya berputat pada isu-isu hukum melulu, akan tetapi kejernihan fikirnya dibuktikan dengan melihat berbagai macam fenomena-fenomena sosial termasuk ekonomi, politik, dan berbagai macam persoalan bangsa lainnya. Dalam artikel tersebut (*Masa Lalu Indonesia-Belanda*) beliau telah mengkritik habis-habisan dan mengupas tentang kebijakan *kulturstelsel* yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, yang kemudian akan berimplikasi terhadap degradasi ekonomi Indonesia (Hindia-Belanda) kala itu. Tentunya kita semua tahu bahwa, catatan sejarah tentang masa kolonialisme Belanda merupakan sebuah catatan sejarah yang sangat kelam, yang banyak menggambarkan kenestapaan Bangsa kita kala itu. Sejarah tersebut telah menjadi saksi bahwa pihak kolonial jua-lah yang kelak akan menikmati dari sistem yang mereka bangun di atas Ibu Pertiwi ini. Untuk lebih detailnya terkait kebijakan *kulturstelsel* akan saya bahas selanjutnya.

¹ Lihat Satjipto Raharjo, Kolom Opini, Kompas, *Masa Lalu Indonesia-Belanda*. Kompas, Sabtu, 18 April 2009.

² Ibid..

Bagaimanapun dalam tulisan ini, saya tidak berusaha menghadirkan sebuah pemaparan yang komprehensif mengenai proses, serta telaah yang mendalam terkait kebijakan ekonomi kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya data secara detail yang berhasil saya kumpulkan untuk menjadikannya sebuah tulisan yang menjadi kiblat terhadap kajian ekonomi kolonialisme. Setidaknya dari titik ini kita berusaha meneropong meskipun agak samar, terkait dengan bagaimana kondisi dan pola ideologi yang di semaikan oleh bangsa-bangsa kolonial terkait dengan misi mereka dalam melakukan gerakan ekonomi kolonialisme yang menjadi sebuah metode yang jitu untuk mengumpulkan kekayaan bangsanya. Namun pada kesempatan ini saya berusaha memberikan gambaran bagaimana diskursus yang dilontarkan oleh Prof Tjip, terkait kebijakan ekonomi kolonialisme Belanda, kemudian saya coba membenturkannya dalam konteks historitas.

Dimulai dari Liberalisme Ekonomi Klasik

Ketika membicarakan tentang ekonomi liberal klasik, maka mau tidak mau kita harus mengawalinya dengan meneropong pada sebuah objek, atau sebuah lintasan pertama, yaitu lintasan yang dibangun dan dibentuk oleh pemikiran Adam Smith. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena Smith-lah yang pertama kali menyuarakan anjuran dibukanya perdagangan bebas. Doktrin tersebut, telah Smith tuangkan dalam *magnum-opusnya The Wealth of Nations*. Ketidak merataan sumber daya alam memang menjadikan salah satu alasan untuk tidak mengelak bahkan tidak sanggup lagi menafikan adanya sebuah perdagangan yang saling menguntungkan. Setiap Negera juga menginginkan sebuah upaya untuk melakukan serangkaian aktivitas produksi, guna memenuhi segala macam kebutuhan, baik kebutuhan dalam negeri ataupun luar negeri, dari sinilah kemudian perdagangan bebas menjadi sangat rasional.

Kritik Smit kala itu tidak serta merta lahir dari ruang hampa, akan tetapi kritik Smit lahir dari rahim kegelisahannya (kegelisahannya terhadap kebijakan merkantilisme). Lontaran kritik ia alamatkan kepada pemerintahan merkantilis yang menganggap perdagangan antar Negara tidaklah penting. Bagi merkantis yang terpenting adalah bagaimana Negara harus memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa perlu melakukan perdagangan dengan Negara lain. Pada masa itu sumber kemakmuran hanya diukur dari jumlah emas atau perak yang dimiliki, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana kondisi waktu, hampir semua negara berkompetisi untuk mengumpulkan emas dan perak sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran (Negara-negara Eropa Barat). Bahkan negara penganut merkantilisme rela untuk mengirimkan utusan untuk ekspedisi, mereka mengorbankan apa saja termasuk perang, demi kepentingan mengumpulkan kekayaan. Selain itu juga merkantilis menekankan adanya perdagangan yang harus seimbang, seimbang artian jumlah emas harus selalu tetap dan tidak boleh berkurang. Adam Smith mengungkapkan “*The great affair, we always find, is to get money*” tegas Smith dalam traktatnya *The Wealth of Nations* (398)³.

³ Dari kutipan tersebut persoalan yang selalu kita cumpai adalah mengumpulkan uang”. Itulah yang menjadi sebuah alasan Smith kurang sepakat dengan upaya yang dilakukan oleh merkantilis, asumsi saya adalah ketika itu Adam Smith tidak sepakat dengan upaya negara untuk melakukan berbagai tindakan apapun itu demi terkumpulnya kekayaan negara dalam bentuk uang (ketika itu emas). Lihat Mark Skousen “*The big three in economics : Adam*

Selain itu traktat tersebut juga mengenalkan adanya konsep yang kita kenal dengan *devision of labour* atau sistem pembagian kerja. Smith meyakini bahwa, dengan adanya spesialisasi atau pembagian kerja otomatis akan berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian secara terus menerus. Dalam traktatnya ia mengungkapkan:

The effect of the colony trade, in its natural and free state, is to open a great though distant market, for such parts of the produce of British industry as may exceed the demand of the markets nearer home, of those of Europe, and of the countries which lie round the Mediterranean sea. In its natural and free state, the colony trade, without drawing from those markets any part of the produce which had ever been sent to them, encourages Great Britain to increase the surplus continually, by continually presenting new equivalents to be exchanged for it. In its natural and free state, the colony trade tends to increase the quantity of productive labour in Great Britain, but without altering in any respect the direction of that which had been employed there before. In the natural and free state of the colony trade, the competition of all other nations would hinder the rate of profit from rising above the common level, either in the new market, or in the new employment. The new market, without drawing anything from the old one, would create, if one may say so, a new produce for its own supply; and that new produce would constitute a new capital for carrying on the new employment, which, in the same manner, would draw nothing from the old one⁴.

Ada sebuah penekanan yang dilakukan oleh Adam Smith terhadap perdagangan bebas dan koloni perdagangan, Smith memberikan contoh kalau dengan dibukanya kolonialisme perdagangan akan berimbas pada produktivitas dari Negara Inggris yang kala itu tengah mengawali ide kolonialisme perdangan. Produktivitas yang diakibatkan oleh kolonialisme perdagangan tersebut, kemudian akan berimbas secara langsung terhadap system pembagian kerja atau *devision of labour* yang nantinya akan menjadi reactor bangkitnya revolusi industry di eropa.

Kesaksian Smith dalam traktanya tersebut merupakan sebuah kerja intelektual, karena *The Wealth of Nations* menjadi titik awal peradaban besar dunia, meskipun banyak berbagai macam hujaman kritik dilontarkan oleh para pemikir-pemikir ekonomi setelahnya. Adam Smith berusaha menekankan bahwa dibukanya perdagangan bebas, merupakan sebuah alat pacu untuk meningkatkan produktivitas Negara yang nantinya akan berpengaruh pada pendapatan Negara, karena kita tidak dapat menafikan adanya sumberdaya yang berbeda pada tiap Negara. Smith memberi contoh bahwa dalam perdagangan pasar bebas dan dibukanya perdagangan koloni, menjadi stimulan peningkatan perdagangan produk-produk industri di Inggris, pasar produk industri inggris mampu menjangkau Negara-negara eropa lainnya dan beberapa Negara di

Smith, Karl Marx, and John Maynard Keynes”, M.E. Sharpe, Inc., 80 Business Park Drive, Armonk, New York 2007, page 8.

⁴ Lihat Adam Smith “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”, Originally published in 1776. This edition published by Harriman House, Harriman House Ltd, 2007, p 393.

sepanjang laut mediterania. Sekali lagi Smith dalam kutipan di atas menegaskan bahwa, adanya koloni perdagangan telah menjadi nyali terbesar untuk meningkatkan kuantitas kerja yang produktif, seperti yang ia contohkan di Inggris, kuantitas kerja juga banyak dipengaruhi oleh adanya pembagian kerja (*devision of labour*) yang telah Smith tekankan dalam *magnum-opusnya*.

Dengan demikian kita dapat menyulurkan benang merah, antara pemikiran Smith yang tertuang dalam *The Wealth of Nations* dengan adanya ekspansi teritorial oleh Negara-negara eropa barat terhadap Negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tampaknya kita perlu menggarisbawahi apa yang dikemukakan oleh almarhum Prof.Dr Sritua Arief yang mengatakan bahwa: *Dengan perkataan lain prinsip yang dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik telah menjadi dasar ideologis perkembangan kolonialisme ekonomi oleh kekuatan politik Eropa Barat, terhadap Negeri-negeri yang mereka jajah di Asia, Afrika dan Amerika Latin*⁵. Memang diskursus yang di kemukakan oleh pemikir ekonomi klasik baik itu Adam Smith, David Ricardo, Malthus, JB Say, John Stuart Mill selalu berujung pada kesimpulan bahwa kolonialisme perdangan adalah sebuah upaya untuk mencapai kemakmuran perekonomian. Para pemikir ekonomi tersebut memang sangat idieologis dengan menekankan bahwa perdagangan bebas yang dilanjutkan dengan kolonialisme ekonomi telah merubah nasib Negara-negara eropa menjadi negara-negara yang makmur. Latar belakang ideologis itulah yang kemuadian dianggap sebagai pembenaran terhadap ekspansi perdagangan dan ekspansi teritorial oleh Negara-negara barat (Negara superior) yang pada akhirnya menjadi malapetaka bagi Negara-negara yang inferior termasuk Negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

Datangya Kekuasaan Barat

Sebelum adanya Nusantara yang diperkenalkan oleh Gajah Mada, bangsa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan, yang mana segala macam bentuk kekuasaan masih ada di tangan para penguasa-penguasa lokal (para raja-raja) yang nantinya kekuasaan tersebut akan runtuh dengan sendirinya seiring dengan datangnya kolonialisme barat. Memang kekuasaan lokal itu sudah ada sebelum kedatangan bangsa barat. Runtuhnya atau jatuhnya kekuasaan lokal itu tidak serta merta karena hantaman kekuasaan dari barat, akan tetapi dikarenakan kekuasaan tersebut hanya di tangan raja, sehingga tingkat kelembagaanya sangat rendah, kepastian atau *rule of game* dari proses pemerintahannya, tidak memungkinkan untuk mengelola sebuah pemerintahan yang kokoh, proses perebutan kekuasaan juga acap menimbulkan konflik-konflik berdarah. Selanjutnya baru kekuatan asing mulai menyusun kekuatannya menuju kolonialisme di Indonesia. Parakitri Simbolon mengungkapkan bahwa kenyataan itu berkaitan dengan fungsi ganda VOC sebagai perusahaan dagang dan sebagai kekuasaan Negara⁶. Singkat kata, kekuasaan lokal itu runtuh atau tumbang karena tidak ada bangunan yang kokoh dari pemerintahan mereka sendiri.

Dengan runtuhnya kekuasaan-kekuasaan lokal dibeberapa daerah, tentunya semakin memuluskan langkah VOC untuk menancapkan kekuasaanya di hindia belanda. Kekuasaan serta

⁵ Lihat Sritua Arief, *Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi*, dalam Jurnal Prisma, Edisi 1 bulan Januari, 1982, pg. 29.

⁶ Lihat Parakitri T. Simbolon, *Menuju Indonesia*, Kompas, Jakarta 1995 p 4.

fungsi ganda VOC itu yang kemudian menjadi babak baru terkait hegemoni mereka di Indonesia. Selanjutnya VOC memproduksi berbagai macam kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat dikemudian hari.

Cultuurstelsel; sebagai Bentuk Kolonialisme Ekonomi di Indonesia

Setelah VOC membenamkan kekuasaan dan perdangangannya di Indonesia, kemudian kebijakan yang dianggap menguntungkan bagi mereka mulai diperlakukan. Salah satunya adalah kebijakan cultuurstelsel. Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu kebijakan yang menyerak rakyat Indonesia kedalam jurang kenestapaan. Pada dasarnya cultuurstelsel yaitu sistem tanam paksa yang mulai diberlakukan di Indonesia khususnya di pulau Jawa pada tahun 1830 merupakan manifestasi “spesialisasi paksaan” (*forced specialization*) yang didasarkan kepada analisa manfaat komparatif Ricardo oleh penjajah⁷. Ketika kita melihat apa yang telah banyak diungkapkan oleh David Ricardo dalam traktatnya *On the principles of political economy, and taxation*, Ricardo banyak membicarakan tentang adanya hukum keuntungan komparatif. Hukum keuntungan komparatif yang Ricardo ilustrasikan ialah dalam traktat tersebut ia mengilustrasikan fenomena tentang produksi anggur di Portugal dan Produksi pakaian di Inggris. Dalam traktat setebal 483 halaman tersebut Ricardo mengungkapkan:

The quantity of wine which she shall give in exchange for the cloth of England is not determined by the respective quantities of labour devoted to the production of each as it would be if both commodities were manufactured in England or both in Portugal England may be so circumstanced that to produce the cloth may require the labour of 100 men for one year and if she attempted to make the wine it might require the labour of 120 men for the same time England would therefore find it her interest to import wine and to purchase it by the exportation of cloth.

To produce the wine in Portugal might require only the labour of 80 men for one year and to produce the cloth in the same country might require the labour of 90 men for the same time It would therefore be advantageous for her to export wine in exchange for cloth This exchange might even take place notwithstanding that the commodity imported by Portugal could be produced there with less labour than in England Though she could make the cloth with the labour of 90 men she would import it from a country where it required the labour of 100 men to produce it because it would be advantageous to her rather to employ her capital in the production of wine for which she would obtain more cloth from England than she could produce by diverting a portion of her capital from the cultivation of vines to the manufacture of cloth⁸.

Sama dengan Smith yang mengusulkan adanya *division of labour*, Ricardo juga menyarankan bahwa perlu adanya spesialisasi yang bersifat memaksa, pada Negara-negara yang memiliki perbedaan sumberdaya, cost produksi dan tenaga kerja, agar Negara-negara tersebut dapat memproduksi secara maksimal dan efisien. Dengan kata lain diskursus yang di lontarkan oleh

⁷ Opcit Sritua Arief, p 31.

⁸ Lihat David Ricardo dalam, *On the principles of political economy, and taxation*, London 1821, pg. 140-141

Ricardo telah membawa pada suatu keadaan bahwa *forced specialization* pada perdagangan antar Negara sangatlah diperlukan, seperti yang ia ilustrasikan pada contoh perdagangan anggur dan pakaian di Portugal dan Inggris.

Namun basis teoritis yang di ungkapkan oleh Ricardo lagi-lagi menjadi salah satu legitimasi barat untuk memberlakukan hal yang sama terhadap bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Lagi-lagi barat menjadikan liberalisme kalsik sebagai landasan teoritis ekonomi kolonialisme yang kemudian menyeret Negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Selatan ke dalam kubangan penderitaan.

Dari dasar teoritis tersebut-lah, kemuadian Negara-negara barat mulai menunjukan sikap arogansinya, seperti yang di tunjukan oleh kolonialisme Belanda dengan sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel*. Belanda memanfaatkan adanya celah toritis dari liberalisme klasik, untuk dijadikannya sebagai alasan pembenar dalam melakukan komersialisasi dan eksploitasi sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia yang kemudian melahirkan adanya *cultuurstelsel* kelak.

Pada fase itu (*cultuurstelsel*) pemerintahan kolonialisme belanda secara membabi buta meng-eksploitasi sektor pertanian masyarakat dengan mekanisme tanam paksa. Komersialisasi pertanian melalui *cultuurstelsel*, jelas merupakan sebuah fondasi perekonomian kolonialisme belanda yang tanpa proses dan modal pokok investasi. Disatu sisi perkeonomian kolonialisme belanda mendapatkan surplus melalui kebijakan tersebut, karena berhasil melakukan mobilisasi perekonomian secara massif dan nyata-nyata menguntungkan mereka. Rezim kolonial memanen kemakmuran dari tindakannya yang menekan pendapatan para petani yang semakin kecil dan nyaris tidak mendapatkan apa-apa dari jerih payah mereka selama melakukan aktivitas pertanian mereka, secara alamiah kondisi tersebut membuat para petani menjadi tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak memiliki mutu, dampak lain juga berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup petani, bahkan mimpi mereka untuk mendapatkan kesejahteraan dari produktifitasnya jauh dari keniscayaan.

Degradasi sosial yang melanda para petani yang ditandai dengan semakin semakin besarnya lapisan atau golongan proletariat merupakan sebuah realitas yang tak terbantahkan. Proses *cultuurstelsel* tak ubahnya seperti mesin-mesin produksi yang digunakan oleh kolonialisme belanda yang nyaris mengabaikan kesejahteraan kaum petani. Menurut Sritua Arief pulau Jawa dimasa pada tahun 1926 telah terdapat sebanyak 62,5 persen penduduk desa di Jawa telah digolongkan sebagai lapisan miskin desa atau lapisan proletariat desa⁹. Selain itu Sritua Arief juga menambahkan bahwa pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera Timur dengan dibayangi oleh *Poenale Sanctie* mirip dengan pengiriman budak oleh kekuasaan Kolonial Inggris ke West Indies untuk dipaksa bekerja di perkebunan-perkebunan gula di sana¹⁰. Kenyataan pahit bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Utara memang dialami selama berates-ratus tahun semenjak bangsa barat mulai melakukan penjelajahan dunia, kemudian mereka memulai proses kolonialisasi mereka. Sebuah refleksi tentunya sangat penting dilakukan, agar bangsa-bangsa yang menjadi objek kolonialisme barat tidak terus-menerus menjadi bangsa-bangsa yang inferior.

Kemandulan kesejahteraan dan kualitas hidup para petani di Indonesia, yang diakibatkan oleh sistem *cultuurstelsel* ini menjadi semacam sejarah yang sangat kelam. Jutaan masyarakat Indonesia tentunya tidak ingin mengingat kembali masa itu, namun pada kesempatan ini saya

⁹ Sritua Arief dan Adi Sasono, *Indonesia; Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981, pg. 89.

¹⁰ Ibid, pg. 31.

tidak ingin mengorek kembali luka lama tersebut hingga menjadi luka baru atau semacam membangkitkan rasa paranoid jutaan masyarakat Indonesia. Pada tulisan ini saya hanya mencoba membangkitkan kepercayaan diri bahwa bangsa kita sebenarnya merupakan bangsa yang telah banyak berjasa terhadap kejayaan kolonialisme belanda seperti yang pernah diungkapkan oleh Prof. Tjip yang saya kutip pada bagian awal catatan ini.

MNC sebagai Jelmaan dari Kolonialisme Ekonomi

Kemerdekaan telah dicapai oleh bangsa Indonesia, saya rasa bukan merupakan salah satu simbol lepasnya Indonesia dari bayang-bayang kolonialisme atau superioritas Barat. Kenapa demikian? Kita dapat melihat dari beberapa perspektif. Yang *pertama* Barat kini telah merubah model pendekatannya untuk melampiaskan kehendak berkuasa mereka yaitu dengan jalan bisnis untuk menundukan Negara-negara yang mereka anggap lemah. Yang *kedua* adalah kekuatan-kekuatan barat itu telah menjelma dalam bentuk bantuan-bantuan yang mereka kemas dalam bentuk bantuan luar negeri atau *foreign aid*.

Sejarah telah mencatat, bagaimana orang-orang seperti Iskandar Agung, Napoleon, Hitler menggunakan kekuatan pasukan mereka untuk berperang sebagai salah satu cara untuk memperluas daerah kekuasaan mereka, kini Negara-negara Barat menggunakan cara yang lebih halus namun memiliki efek yang sangat besar yaitu dengan jalan bisnis, bisnis dapat menundukan setiap keping wilayah di dunia.

Barat kini memainkan peran yang sangat dominan dalam drama perekonomian dan bisnis dunia, kini kepingan-kepingan Negara yang inferior itu telah tunduk dalam satu imperium Korporasi-korporasi raksasa. Ya kita tengah ada dalam bayang-bayang imperium korporasi-korporasi besar, gejala tersebut dapat kita lihat dengan kekuatan MNC (*Multi National Corporation*) yang ada di Indonesia. Menyoal tentang gejala MNC seolah kita sedang dihadapkan dalam permasalahan-permasalahan yang menjangkau masalah-masalah sosial, kebudayaan, politik, psychology, sosiologi, kebudayaan dan tentunya ekonomi. Kekuatan Barat yang beresonansi dengan MNC tersebut telah menghasilkan sebuah daya yang cukup besar, fenomena MNC tak ubahnya seperti penjara *panopticon*¹¹ yang ada dalam proposal Jeremy Bentham.

Kekuatan MNC dapat kita lihat dibidang ekonomi yang terkait dengan mekanisme pasar, stuktur organisasi MNC, kebijakan manajemen sumberdaya manusia, manajemen operasi, dan marketing telah banyak menimbulkan banyak pengaruh ke segala aspek. Salah satu contohnya dalam kebijakan mekanisme pasar dominasi MNC sangat kentara, adanya MNC di Indonesia banyak mengancam perusahaan dan pengusaha-pengusaha pribumi. Hal tersebut karena pengusaha local atau pribumi kalah secara kekuatan financial, manajemen dan pangsa pasar mereka. Dalam sebuah paper yang ditulis oleh Daniel Dhakidae dalam jurnal prisma mengungkapkan tentang posisi MNC Dimata Indonesia, ia mengatakan:

¹¹ *Panopticon*, dalam proposal Bentham, merupakan penjara yang dibangun bertingkat dan melingkar. Ditengah-tengah penjara kamar-kamar sel yang mengelilingi tersebut dibangunlah sebuah menara tower. Dari dalam menara tersebut penjaga dapat melihat seluruh gerak-gerik tawanan. Lihat, Barton, Ben F., and Marhalee S. Barton. *Model of Powe Technical and Profesional Visuals*. Journal of Business and Technical Communication 7.1, 1993, 138-62.

Walaupun begitu pentingnya masalah MNC bagi kita sudah nyata sehingga debat-debat soal strategi pembangunan dan Orde Ekonomi Internasional Baru [...] dibidang ekonomi ada masalah mekanisme pasar, struktur organisasi MNC [...] perusahaan MNC secara satu persatu, manajemen keuangan termasuk transfer valuta serta perpajakan, stuktur dan system ekonomi dari Negara-negara dimana MNC beroperasi serta sejarahnya, masalah MNC secara khusus di Negara-negara berkembang, soal perburuhan serta system produksi dan pola konsumsi serta perdagangan dan ekonomi internasional [...] Masalah politik dalam hubungan dengan MNC lebih mengandung perdebatan hangat karena adanya dugaan kuat dalam kalangan pengamat politik bahwa MNC mempunyai peran sampai kepada usaha merobah serta menjatuhkan pemerintahan, sejak zaman kegagalan Mossadegh di Iran, hingga pada contoh yang sudah menjadi klasik yaitu Allende di Chili¹².

MNC telah masuk ke berbagai perlintasan dibidang sosiologi, kebudayaan, politik, psychology, adanya MNC banyak meninggalkan jejak terkait perdebatan mengenai pengaruh yang mereka benamkan terhadap perilaku masyarakat, perubahan karakteristik serta struktur dan budaya masyarakat, telah menyiratkan sebuah pantulan cahaya sendiri. Sebagai contoh perubahan perilaku masyarakat atau perilaku konsumen yang banyak mengalami perubahan seperti gaya hidup atau *lifestyle* masyarakat yang menuju pada hedonisme dan konsumerisme, banyak digiring oleh pola-pola yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan raksasa tersebut.

Pola-pola yang dibangun oleh MNC tersebut merupakan pola yang dikonstruksi dan dikendalikan oleh negara-negara super power dimana MNC tersebut berasal. Banyak kebijakan-kebijakan MNC yang secara langsung mempengaruhi kondisi di suatu negara. Bahkan di Negara-negara berkembang para politisi melakukan persenggamaan politik mereka, tentunya para politisi tersebut memiliki harapan agar MNC menggelontorkan dana-dana segar ke kantong para politisi tersebut untuk serangkaian aktivitas dan manufer politik mereka. Mulai dari biaya kampanye politik, hingga dana-dana sosial yang disiapkan oleh MNC banyak melibatkan para politisi sebagai ladang subur mereka sebagai upaya untuk *survival*-nya. Disisi lain MNC juga mendapatkan keuntungan dibalik aktivitas transaksional mereka ke percaturan politik, itu dapat dilihat dari bagaimana MNC tersebut mengharapkan imbalan dari para penguasa atau politisi terkait kebijakan-kebijakan yang akan mereka keluarkan setelah para politisi itu menduduki singgasana kekuasaanya.

Jadi begitu-lah panorama yang tersaji di kehidupan realitas, MNC merupakan salah satu jelmaan dari kekuasaan negara Super Power yang dulu juga merupakan negara kolonial. Kini Indonesia ada dalam sebuah keadaan yang sangat paradoksal, disatu sisi pemerintah atau pengambil kebijakan tidak berdaya dan tunduk terhadap kekuasaan negara-negara besar yang termanifestasi dalam MNC itu sendiri, tetapi di satu sisi kita tengah di paksa untuk mengikuti pola yang telah digunakan oleh superioritas barat dengan MNC-nya. Masyarakat juga sudah terpolakan dengan gedoran MNC yang masuk ke wilayah fikiran mereka, produk-produk seperti Coca-cola, Bir

¹² Lihat Daniel Dhakidae, *Indonesia Dimata MNC dan MNC Dimata Indonesia*, dalam Jurnal Prisma, Edisi No. 4 bulan April, 1977, pg. 58.

Bintang, dan gerombolan-gerombolan mereka kini sudah menempati peringkat pertama (*top of mind*) dalam benak konsumen dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Raut wajah yang muram terkait hegemoni MNC Nampak terlihat dari gambar PT Freeport yang sampai sekarang masih meninggalkan luka-luka baik kasus terkait pelanggaran HAM, dan kasus lainnya yang masih menyimpan beribu Tanya dan teka-teki. Lebih dari 44 tahun MNC tersebut berdiri di tanah Cendrawasih, banyak pula hembusan-hembusan berita buruk yang muncul. Ada beberapa raport buruk yang melekat pada MNC asal AS tersebut, diantaranya adalah kerusakan lingkungan, kemiskinan masyarakat lokal, perampokan hak ulayat, kekerasan, dan pembunuhan yang berulang terjadi terhadap manusia Papua di sekitar Freeport, bahkan isu itu telah melahirkan keprihatinan komunitas nasional, bahkan internasional.

Problem terkait MNC seolah mengingatkan kepada sebuah keadaan, yaitu kolonialisme ekonomi yang menyimpan memiliki cerita dan makna tersendiri untuk rakyat Indonesia. Dera tentang kolonialisme ekonomi memang tidak bisa lepas begitu saja dari narasi sejarah bangsa ini, dan sekarang gambaran sejarah masa lalu tersebut terulang lagi seiring dengan lahirnya imperium baru yaitu MNC yang merupakan jelmaan dari kolonialisme ekonomi yang dibalut dengan jubah-jubah modernitas.

Awan hitam yang menyelimuti langit nusantara terkait problem kolonialisme ekonomi dan gejala MNC yang hegemonial adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan. Namun perlu kita ingat bahwa problem tersebut merupakan problem bersama yang menuntut adanya kesadaran kolektif, kemudia siapa yang berhak menyelesaikan? Dan apakah dapat terselesaikan? Jawabanya ada ditangan pemimpin-pemimpin bangsa, para pengambil kebijakan, dan seluruh komponen masyarakat yang ada dalam pusaran perekonomian Indonesia, bukan tidak mungkin problem itu terselesaikan, problem kolonialisme ekonomi justru menjadi ujian untuk masa mendatang agar kita menghayati bahwa Indonesia mutlak dan perlu di dikeluarkan dari kubangan dan siklus kolonialisme ekonomi, maka pemahaman dan penghayatan penghayatan harus diikuti dengan suatu pekerjaan politik yang besar dan harus disertai dengan gerakan kebudayaan. Dan ini bukan tidak mungkin, tetapi menjadi sebuah keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Sritua. "Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi." *Prisma*, no. 1 (Januari 1982).

Arief, Sritua, dan Adi Sasono. *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981.

Barton, Ben F., and Marthalee S. Barton. "Models of Power: Technical and Professional Visuals." *Journal of Business and Technical Communication* 7, no. 1 (1993).

Dhakidae, Daniel. "Indonesia di Mata MNC dan MNC di Mata Indonesia." *Prisma*, no. 4 (April 1977).

Rahardjo, Satjipto. "Masa Lalu Indonesia–Belanda." *Kompas*, April 18, 2009.

Ricardo, David. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. 3rd ed. London: John Murray, 1821.

Skousen, Mark. *The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, and John Maynard Keynes*. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2007.

Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Originally published 1776. Petersfield, UK: Harriman House, 2007.